



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Juni 2020

Halaman: 1

Tahun Ajaran Baru di DIY Masih Daring

JOGJA-Tahun ajaran baru di DIY masih akan dijalani para pelajar dengan pembelajaran tanpa tatap muka alias belajar daring. Hal ini karena di Bumi Mataram belum ada satu wilayah pun yang terkategori zona hijau.

Catur Dwi Janati, Lajeng Padmaratri & Jumali
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Di DIY, belum ada satu kabupaten/kota yang masuk kategori zona hijau.
- ▶ PGRI mengingatkan agar pemerintah daerah tetap hati-hati terkait dengan kebijakan membuka sekolah di tahun ajaran baru.

Pemerintah memutuskan membuka sekolah yang berada di zona hijau Covid-19 untuk bisa belajar tatap muka dengan syarat yang ketat. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, saat ini sudah ada 92 kabupaten/kota di Indonesia terkategori zona hijau. Namun wilayah berlabel zona hijau itu belum ada yang berada di kawasan Pulau Jawa. "Kami lihat warna hijau. Sekarang ini ada 92 kabupaten/kota, tetapi data ini adalah data pada 7 Juni yang lalu."

▶ Halaman 10

Instansi

Tindak Lanjut

☐ Negatif

☐ Amat Segera

☐ Untuk Ditanggapi

Tahun Ajaran...

"Nah, kami segera menghubungkan setelah data-data lebih lengkap lagi dan bisa saja jumlah yang 92 ini akan berkurang jadi lebih kecil lagi," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam konferensi persnya yang disiarkan di *Youtube* Kemendikbud RI, Senin (15/6).

Belum masuknya DIY ke zona hijau menjadikan sistem pembelajaran di tahun ajaran baru akan dilakukan dengan sistem daring. Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko mengatakan saat ini wilayahnya masih termasuk kategori zona kuning. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran untuk tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimaksimalkan dengan daring. "Oleh karena itu, saat ini pelatihan kepada pengajar dan metode serta materi pembelajaran terus kami siapkan. Semua harus dipersiapkan sebelum tahun ajaran baru yang dimulai pada 13 Juli mendatang," katanya, Selasa (16/6).

Selain itu, Isdarmoko menyatakan Disdikpora juga terus mengondisikan peserta didik dan masyarakat terkait dengan rencana penerapan protokol kesehatan jelang diterapkannya era kenormalan baru. "Langkah awal memang baru sebatas pemetaan. Tetapi kami harus persiapan semuanya. Begitu new normal diterapkan, nantinya sistem pembelajaran bisa dimaksimalkan," ucapnya.

Senada diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Arif Haryono. Siswa di Kabupaten Sleman, kata Arif, masih akan menempuh metode jarak jauh untuk siswa di Sleman pada tahun ajaran 2020/2021 mendatang. "Tahun ajaran baru pembelajaran masih *online*," ujarnya, Selasa (16/6).

Namun untuk detailnya, Arif mengakui masih menunggu kebijakan dari Dinas Dikpora DIY terkait dengan hal ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Asrori mengatakan aktivitas pembelajaran sekolah di Kota Jogja tahun ajaran baru 2020/2021 masih menunggu rekomendasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja. "Kami mengikuti rekomendasi gugus tugas saja, yang jelas harus ada jaminan aman bagi warga sekolah," jelasnya.

Namun Budi menegaskan untuk sampai akhir tahun ajaran 2019/2020 aktivitas pembelajaran di sekolah ditiadakan walau tahun ajaran baru tahun 2020/2021 di Kota Jogja dimulai 13 Juli 2020. "Saya tidak bisa menjawab [secara pasti], tetapi kalau melihat situasi seperti ini kehalalannya juga belum ada aktivitas pembelajaran di sekolah," ujarnya.

Namun Budi menyatakan semua keputusan tergantung dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja. Kecuali bila ada rekomendasi gugus tugas aktivitas sekolah dibuka kembali dengan syarat seperti dan protokol tertentu maka Disdik Kota Jogja akan mengikuti. Budi mengatakan akan mengikuti rekomendasi gugus tugas bagaimana aspek warga sekolah, anak-anak, guru, tenaga kependidikan semuanya aman.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan jadwal tahun ajaran 2020/2021 tidak akan berubah, tetap dimulai pada Juli. Nadiem juga menegaskan pembelajaran pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, yaitu peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, tetap melakukan pembelajaran dari rumah.

Nadiem mengatakan ada 94% peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah. Sedangkan sisanya 6% peserta didik yang berada di zona hijau diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Hati-Hati

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan untuk tetap hati-hati terkait dengan kebijakan membuka sekolah di tahun ajaran baru. PGRI mengatakan tidak semua guru atau murid tinggal di wilayah zona hijau. Untuk itu diharapkan adanya kehati-hatian karena tidak ada yang bisa menjamin tertularnya atau tidak jika sekolah zona hijau dibuka.

Tetap harus berhati-hati terhadap zona hijau yang enam persen itu, karena berdasarkan survei yang dilakukan PGRI, meskipun sekolahnya di zona hijau, gurunya banyak tinggal di zona merah, karena guru itu tidak tinggal di sekitar sekolah, jadi nggak ada yang bisa menjamin," kata Ketua

Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, saat dihubungi, Selasa.

Unifah mengatakan protokol kesehatan juga harus disiapkan secara ketat di lingkungan sekolah. Sebab menurutnya bisa saja murid atau guru tidak menggunakan protokol kesehatan dalam perjalanan. "Kemudian protokol kesehatan, harus disiapkan secara ketat, proses, prosedurnya, siapa yang menjamin bahwa mereka ketika di jalan menggunakan protokol kesehatan," katanya.

Lebih lanjut, dia berpendapat sistem mengajar juga harus diatur secara spesifik. Dengan demikian, penilaian kinerja para guru tetap berjalan secara objektif. "Terus tata kelola gurunya, yang mengajarnya juga harus diatur secara spesifik, misalnya ada peraturannya itu jalan, supaya nanti dalam penilaian kinerja dan lain sebagainya gurunya tidak disalahkan," kata Unifah.

Adapun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar Kemendikbud menyiapkan protokol kesehatan yang mendukung sekolah dalam menjalani *new normal*, salah satunya melakukan tes *polymerase chain reaction* (PCR) atau tes *swab* pada guru dan murid.

"Pertama, tes PCR untuk tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Seluruh guru yang akan mengajar harus menjalani tes PCR, untuk memastikan mereka sehat dan tidak tertular Covid-19. Pemerintah juga harus melakukan tes PCR secara acak kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

KPAI mengingatkan pentingnya melakukan tes untuk memastikan bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster baru ketika Kemendikbud memutuskan membuka sekolah. Bahkan di China, para guru yang akan mengajar tidak hanya dites PCR, tetapi juga menjalani karantina selama 14 hari.

Selain itu KPAI mengingatkan harus ada protokol kesehatan Covid-19 ketika sekolah dibuka sesuai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Sebab situasi dan kondisi anak di masing-masing jenjang pendidikan berbeda-beda. *(JMB/ Detik)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005